

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi politik, ekonomi, sosial dan pertahanan Republik Rakyat Cina (RRC) sekarang ini berbeda dengan RRC yang dikenal di era 1960-an bahkan awal 1990-an sekalipun. RRC sekarang ini adalah kenyataan yang harus diperhitungkan dan dianggap bisa menjadi kekuatan besar di masa mendatang. Hal tersebut bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang semakin meroket tajam, dengan penguasaan teknologi yang semakin canggih serta kapabilitas diplomasi yang bertambah elegan. RRC selain merupakan negara berpenduduk terbanyak di dunia, juga merupakan suatu negara yang berpengaruh politik cukup besar dan mungkin mendominasi perekonomian dunia, dan merupakan negara yang memiliki kekuatan militer yang tangguh.

Setelah Perang Dingin berakhir, Cina menjadi sebuah fenomena eksotis dalam peta hubungan internasional. Cina menjadi penarik perhatian internasional karena negara ini bersikukuh mempertahankan ideologi komunisme dan sistem partai tunggalnya, sementara di bagian dunia lain banyak negara mulai mencampakan komunisme serta mengadopsi sistem multipartai dan demokrasi. Selama hampir empat dekade Perang Dingin, Cina telah membuktikan kepada dunia bagaimana negara itu memerankan posisi sebagai *balancer* yang strategis dalam perimbangan kekuatan internasional.

Apa yang diraih Cina saat ini tentu saja tidak datang begitu saja, tetapi melalui proses panjang. Kondisi Cina pada akhir masa penjajahan, tahun-tahun setelah itu hingga adanya revolusi Cina pada tahun 1949, diwarnai dengan pertempuran, penaklukan, penyerbuan, dan perang saudara. Pertempuran yang terjadi di dalam negeri Cina berkisar pada perang saudara (*Civil War*), dimana terjadi perebutan kekuasaan antara Partai Nasional Cina (*Kuomintang*) pimpinan Chiang Kai Shek dan Partai Komunis Cina (*Kuochantang*) yang dipimpin Mao Zedong. Adapun pertempuran yang terjadi diluar negara Cina berkisar pada perlawanan Cina terhadap agresi Jepang. Setelah melalui masa yang panjang, PKC akhirnya memenangkan pertempuran melawan Kuomintang, yang akhirnya menyingkir ke Pulau Formosa yang sekarang adalah Taiwan. Maka berdirilah Republik Rakyat Cina pada 1 Oktober 1949 dengan Mao Zedong sebagai presidennya. Lahirnya RRC memperlihatkan berakhirnya pemerintahan nasionalis dan menandai lahirnya suatu fase baru dalam sejarah Cina dimana komunisme secara sistematis dijadikan sebagai ajaran baru yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat Cina.

Kemudian suatu program rekonstruksi dan industrialisasi dalam negeri dilaksanakan untuk menghidupkan perekonomian RRC. Perlahan-lahan RRC muncul sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga menjadi suatu negara yang patut diperhitungkan di lingkungan internasional. Tetapi rupanya perkembangan yang terjadi di Cina itu tidak selamanya mulus, masalah justru terjadi di dalam negeri Cina sendiri, ketika rakyat Cina yang

merasa tidak puas terhadap peraturan dan pemerintahan yang ada mulai menuntut adanya reformasi di segala bidang.

Aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa awalnya terjadi pada akhir tahun 1985, lalu pada akhir 1986 dimana Beijing dan Shanghai menjadi tempat berkembangnya protes mahasiswa tersebut. Demonstrasi terjadi kembali pada tahun 1989 dengan tuntutan-tuntutan yang lain, yang pada akhirnya justru mengakibatkan tragedi yang menyentak dunia internasional, yang kemudian dikenal sebagai Tragedi Tian'anmen. 4 Juni 1989 menjadi hari pembantaian bagi para demonstran di lapangan Tian'anmen, dimana pada malam berkumpulnya ribuan mahasiswa, militer dan pemerintah memperlihatkan sikap brutal dalam usahanya menghentikan aksi protes dengan menggunakan tank dan senjata mesin. Bahkan penduduk sipilpun terkena dampaknya.

Tragedi Tian'anmen tersebut sangat mengejutkan dunia internasional. Peristiwa tersebut telah mencoreng wajah Cina di mata negara-negara lain, bahkan sebagian negara-negara itu langsung mengambil tindakan nyata. Salah satunya Amerika Serikat yang memberikan beberapa sanksi pada Cina, antara lain sanksi penghentian penjualan senjata dan pembatalan pertemuan pemimpin militer kedua negara. Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga melakukan langkah-langkah politik ekonomi dengan menunda seluruh transaksi perdagangan, ekspor persenjataan, hingga penundaan pertimbangan permohonan beasiswa mahasiswa Cina yang ingin belajar di Amerika Serikat. Italia dan Belgia juga mengumumkan penangguhan hubungan kerjasama terhadap Cina. Bahkan *Asian Development*

Bank (ADB) melakukan penghentian sementara bantuannya terhadap Cina untuk waktu yang tidak ditentukan hingga kondisi Cina dianggap stabil.

Aksi negara-negara tersebut justru dianggap sebagai campur tangan terhadap urusan dalam negeri Cina dan menyebabkan pemerintah Cina marah. Bahkan Perdana Menteri saat itu, Li Peng, memberikan peringatan keras terhadap pihak barat agar tidak ikut campur dalam masalah dalam negeri Cina, dengan dalih membela hak asasi manusia dan demokrasi. Pemerintah Cina menganggap tindakannya tepat karena tindakan tersebut dilakukan sebagai usaha pengamanan terhadap wilayah Beijing. Tindakan tersebut perlu dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tampilnya negara di panggung internasional.

Apapun alasan pemerintah Cina, tragedi tersebut telah menjatuhkan kredibilitas, dan otomatis berdampak pada merosotnya citra Cina di mata dunia internasional. Aksi negara-negara Barat tersebut mencerminkan berkurangnya kepercayaan masyarakat internasional kepada Cina, bahkan beberapa negara memberlakukan *travel warning* kepada warganya. Hal itu akan secara otomatis mengurangi jumlah kunjungan masyarakat internasional ke Cina yang akhirnya berdampak buruk pula pada kestabilan ekonomi Cina.

Demokrasi dan pluralisme di Cina terus mendapat banyak sorotan dari masyarakat internasional. Penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Cina menunjukkan terdapatnya rezim komunis Cina yang represif dan totaliter, serta tidak mentolerir pluralisme dan demokrasi. Penindasan yang terjadi di Cina juga dilakukan oleh rezim Jiang Zemin. Rezim tersebut melakukan penindasan dan penganiayaan besar-besaran terhadap para praktisi Falun Gong.

Pelanggaran HAM yang dilakukan rezim Jiang Zemin muncul karena kekhawatiran akan jumlah praktisi Falun Gong yang begitu banyak, yang akan mengganggu jalannya pemerintahan. Buruknya pelanggaran HAM yang dilakukan rezim Jiang Zemin ini mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk di negara-negara Asia dan Eropa. Penganiayaan yang dilakukan oleh Cina membuat citra Cina di dunia internasional menjadi buruk. Cina dianggap tidak melaksanakan demokrasi secara baik di negaranya. Bahkan olimpiade yang dilaksanakan di Cina sempat mendapat tekanan dari berbagai LSM karena ketidakpercayaan atau tidak simpatiknya masyarakat terhadap Cina.¹

Wujud dari citra negatif yang dimiliki Cina adalah adanya aksi protes masyarakat internasional. Aksi protes yang dilakukan masyarakat internasional misalnya pada saat menjelang diselenggarakannya Olimpiade Beijing 2008. Masyarakat internasional menggalang dukungan melalui "*Obor HAM Estafet Global*" untuk mendesak rezim pemerintahan Cina mengakhiri segala ketidakadilan dan kesewenang-wenangan.² "*Obor HAM Estafet Global*" merupakan kampanye internasional yang menyerukan diakhirinya pelanggaran HAM yang terjadi pada rakyat Cina karena selama ini Cina dianggap melakukan pelanggaran HAM sehingga Cina tidak layak menyelenggarakan Olimpiade.³

Namun ditengah tekanan yang dilakukan LSM terhadap Cina, Cina mengajukan dirinya menjadi tuan rumah KTT *Asia-Europe Meeting* (ASEM) VII pada tahun 2008. Nampak bahwa Cina memiliki kepentingan tertentu yang

¹ "Obor HAM Estafet Global: Suluh itu tak berkobar di Cina," dalam <http://www.vhrmedia>, diakses pada 28 Juni 2009

² *Ibid.*

³ "Pelanggaran HAM di Cina Pada Rakyatnya Sendiri: Penganiayaan Falun Gong," dalam <http://www.erabaru.or.id>, diakses pada 21 Juni 2009

membuatnya berani untuk menjadi tuan rumah dalam KTT tersebut. Cina memiliki kepentingan untuk memulihkan citra negaranya karena Cina mendapat "sorotan" dari masyarakat internasional atas pelanggaran-pelanggaran HAM yang telah dilakukannya. Adanya upaya untuk memboikot Olimpiade merupakan tekanan besar bagi Cina, yang pada akhirnya memaksa Cina untuk memulihkan citranya termasuk di kawasan Asia dan Eropa. Selain adanya kepentingan untuk memulihkan citra, apabila pandangan negatif masyarakat internasional terhadap Cina terus berkembang, dapat memungkinkan akan mempengaruhi kondisi ekonomi Cina.

Perekonomian adalah salah satu faktor penting bagi berlangsungnya proses kehidupan bernegara, karena maju atau tidaknya suatu negara dapat dilihat dari keadaan ekonomi negara tersebut. Seperti halnya dengan Cina sebagai negara besar di kawasan Asia Pasifik yang sangat potensial untuk menjadi satu kekuatan baru di dunia internasional, terbukti dengan hasil-hasil yang dicapainya sejak pelaksanaan program modernisasi dalam sistem ekonomi negaranya, terutama dalam sektor pertanian dan perindustrian, pada tahun 1978. Cina mengalami perjalanan panjang dalam menapaki sejarah peradaban negara dan bangsa yang penuh dinamika kebudayaan, politik, dan ekonomi, dan saat ini telah mencapai puncak keemasan dalam meniti jati diri untuk menjadi sebuah negara dan menempatkan diri dalam jajaran negara adidaya dunia.⁴

Meskipun ada kelonggaran terhadap kapitalisme, Partai Komunis Cina tetap berkuasa dan telah mempertahankan kebijakan yang mengekang terhadap

⁴ "RI Kedepankan Dialog," dalam <http://www.kapanlagi.com/h/0000235509.html>, diakses pada 5 Mei 2009

kumpulan-kumpulan yang dianggap berbahaya, seperti Falun Gong dan gerakan separatis di Tibet. Pendukung kebijakan ini umumnya adalah penduduk pedesaan dan mayoritas kecil penduduk perkotaan, menyatakan bahwa kebijakan ini menjaga stabilitas dalam sebuah masyarakat yang terpecah oleh perbedaan kelas dan permusuhan, yang tidak mempunyai sejarah partisipasi publik, dan hukum yang terbatas. Para pengkritik yang terdiri dari minoritas rakyat Cina, para rakyat pelarian Cina di luar negeri, penduduk Taiwan dan Hongkong, etnis minoritas seperti bangsa Tibet dan pihak Barat, menyatakan bahwa kebijakan ini melanggar hak asasi manusia yang dikenal komunitas internasional, dan mereka juga mengklaim hal tersebut mengakibatkan terciptanya sebuah negara polisi, yang menimbulkan rasa takut.

Adanya citra negatif yang dimiliki Cina memungkinkan keengganan negara lain untuk melanjutkan kerjasamanya dengan Cina. Hal tersebut tentu merugikan Cina. Keinginan untuk mensukseskan pembangunannya ekonominya, telah menyebabkan Cina menampilkan politik luar negeri yang independen dan pragmatis dengan berusaha membuka hubungan dengan negara-negara tetangganya di kawasan Asia Pasifik, contohnya dengan menjadi anggota APEC. Tidak hanya regional saja, Cina juga telah menjadi anggota WTO.

Selain APEC dan WTO, Cina juga turut bekerjasama dengan negara-negara Asia Tenggara melalui perjanjian ASEAN +3 bersama Jepang dan Korea Selatan. Dan lebih luas lagi, hubungan perkeonomian Cina juga merambah ke Eropa, salah satunya Cina masuk ke dalam forum *Asia-Europe Meeting* (ASEM) bersama negara-negara anggota ASEAN, dan negara Asia lain serta Uni Eropa.

KTT ASEM merupakan forum antar pemerintah yang paling tinggi tingkatnya antara Asia dan Eropa serta paling besar skalanya. Tidak hanya berpartisipasi saja, karena prestasi kemajuan ekonominya, Cina mendapat kehormatan untuk menjadi tuan rumah KTT ASEM VII Tahun 2008. Tentu saja keberadaan citra Cina yang buruk dapat membawa dampak tidak simpatiknya negara lain terhadap Cina.

Asia- Europe Meeting (ASEM) merupakan forum dialog pemerintah negara Asia dan Eropa, bertujuan meningkatkan hubungan kerjasama yang berlandaskan saling menghargai dan kemitraan yang setara. ASEM merupakan kerjasama dalam bentuk forum dialog antara negara-negara Asia dan Eropa dengan tujuan menguatkan saling pengertian dan kerjasama diantara negara-negara anggota bagi perkembangan ekonomi dan sosial kedua kawasan. Kerjasama ASEM terbagi dalam tiga pilar yakni : (1) pilar politik; (2) pilar ekonomi; (3) pilar budaya.⁵

ASEM dibentuk tahun 1996 sebagai hasil pertemuan 26 kepala negara dari kawasan Asia (10) dan Eropa (16 termasuk Komisi Eropa) di Bangkok, dan keanggotaan ASEM meningkat menjadi 39 negara pada tahun 2006. Sejumlah lembaga multilateral seperti World Bank, ADB, dan IMF selalu terlibat dalam setiap rangkaian pertemuan ASEM meskipun tidak berstatus sebagai anggota.⁶

KTT ASEM VII yang telah dilaksanakan di Beijing, Cina pada tanggal 24-25 Oktober 2008, merupakan pertemuan pertama ke-45 pemimpin negara Asia-Eropa sejak upaya perluasan. Mengusung tema *Vision and Action Toward Win-Win Solution*. Diharapkan dalam pertemuan itu para kepala negara dapat kembali

⁵ “ASEM Finance Deputies’ Meeting 2007 Korea”, dalam <http://www.pksi.depkeu.go.id/liptn.asp?id=34>, diakses pada 5 Mei 2009

⁶ *Ibid.*

menggali potensi yang dimiliki ASEM bagi perwujudan kerjasama yang bersifat saling menguntungkan dan bermanfaat bagi masyarakat di kedua kawasan.

Isu ekonomi menjadi bahasan utama para pemimpin Asia dan Eropa yang menghadiri KTT ASEM di Beijing, 24-25 Oktober 2008.⁷ Negara yang menjadi tuan rumah suatu *event* internasional tentu saja harus mempersiapkan acara dengan baik agar *event* yang diadakan dapat berlangsung dengan sukses.

Saat KTT tersebut berlangsung, para kepala negara ASEAN juga mengadakan pertemuan guna membahas penanganan krisis ekonomi kawasan di sela-sela KTT. Duta besar Prancis menyatakan KTT 2008 ini memperkuat hubungan Asia-Eropa dalam konteks kemitraan yang baru. KTT yang berlangsung ketujuh kalinya tersebut dihadiri 43 negara Uni Eropa dan Asia, serta Komisi Eropa dan Sekretariat ASEAN, dan merupakan penyelenggaraan yang terbesar. Untuk pertama kalinya enam anggota baru berpartisipasi, yakni India, Pakistan, Mongolia, Rumania, dan Bulgaria serta Sekretariat ASEAN, sehingga jumlah anggota ASEM menjadi 45. Negara-negara ASEM mencakup separuh GDP dunia dan hampir 60 persen perdagangan global.

Berbagai masalah yang dibahas dalam KTT ASEM antara lain masalah perdamaian dan stabilitas internasional, pembangunan berkesinambungan, hak asasi manusia, perubahan iklim, ketahanan energi dan pangan, masalah perdagangan dan pemberantasan terorisme. Dalam KTT ASEM VII tersebut ditandatangani Deklarasi Beijing, yang antara lain berisi tentang pembangunan

⁷ “KTT ASEM Bahas Krisis Ekonomi Global,” dalam <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0810/21/luu04.html>, diakses pada 5 Mei 2009

berkelanjutan (*sustainable development*). Pihak Uni Eropa juga melakukan dialog informal yang membahas masalah nuklir Iran dan Myanmar.

Pertemuan puncak 43 kepala negara beserta petinggi Komisi Eropa dan Sekretariat ASEAN itu digelar di tengah "gempa" krisis keuangan dunia yang episentrumnya berada di Amerika Serikat (AS), namun "getaran"nya turut dirasakan oleh bangsa-bangsa di benua Asia dan Eropa. Asisten Menteri Luar Negeri Cina, Liu Jieyi, dalam keterangan persnya menyambut KTT ASEM VII menyatakan bahwa krisis keuangan global yang sedang melanda dunia dipastikan menjadi salah satu agenda penting pembicaraan para kepala negara dan kepala pemerintahan selama dua hari di Beijing. Para pemimpin itu akan membicarakan dampak dari krisis keuangan di AS dan mencari jalan keluar agar pengaruhnya tidak meluas ke negara-negara di benua Asia dan Eropa. Masalah ekonomi, selain politik dan budaya, memang menjadi salah satu pilar kerjasama 27 negara Uni Eropa dan 16 negara Asia yang tergabung dalam ASEM. Sejak dibentuk pada 1996 atas prakarsa Perdana Menteri (PM) Singapura saat itu, Goh Chok Tong, ASEM bertujuan memperkuat hubungan antara Asia dan Eropa melalui kesetaraan dialog serta kerjasama ekonomi, politik dan budaya.

Sebelum pertemuan puncak 43 kepala negara dan kepala pemerintahan di Beijing pada 24-25 Oktober 2008, telah dilaksanakan beberapa pertemuan tingkat menteri Asia-Eropa, diantaranya adalah pertemuan para menteri keuangan Asia-Eropa di Korea Selatan pada Juni 2008, pertemuan para menteri kebudayaan Asia-Eropa pada April 2008. Selain itu, juga dilaksanakan pertemuan antar parlemen

Asia-Eropa, pebisnis swasta kedua benua, serta forum pemuda Asia-Eropa di Beijing.

Sebelum munculnya krisis keuangan global yang dipicu runtuhnya beberapa lembaga keuangan besar di AS, pertemuan menteri keuangan Asia-Eropa di Korea Selatan pada Juni 2008 juga membahas pelajaran yang dapat diambil Asia dari integrasi keuangan di Benua Eropa serta pendekatan pasar yang dimungkinkan dari kesepakatan mengatasi perubahan iklim.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: **“Mengapa Cina bersedia menjadi tuan rumah KTT ASEM VII?”**

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran digunakan untuk mempermudah penulis menjawab hipotesis yang ada. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep kepentingan nasional. Konsep kepentingan nasional merupakan konsep yang populer dalam menganalisa permasalahan yang timbul dalam kajian hubungan internasional, baik untuk mendeskripsikan, menjelaskan, maupun menganjurkan perilaku. Kepentingan nasional tersebut dapat dijadikan alasan suatu negara untuk mengambil suatu kebijakan luar negerinya. Analisis yang sering digunakan oleh para peneliti hubungan internasional adalah konsep kepentingan nasional, sebab konsep kepentingan nasional merupakan dasar bagi

suatu negara untuk menjelaskan perilaku luar negeri serta sebagai alat ukur untuk menentukan keberhasilan politik luar negeri suatu negara. Konsep kepentingan ini sekaligus menjadi dasar evaluasi kebijakan luar negeri.⁸

Penulis menggunakan analisis berdasarkan konsep kepentingan nasional yang dikemukakan oleh Jack C. Plano dan Roy Olton dalam penelitian ini. Kepentingan nasional menurut Jack C. Plano dan Roy Olton merupakan tujuan pokok yang paling penting yang menjadi pedoman para pembuat keputusan di suatu negara dalam membuat kebijakan politik. Negara akan mengedepankan kepentingan utamanya, termasuk di dalamnya hak untuk mempertahankan diri, kemerdekaan, integritas wilayah, keamanan, dan kesejahteraan ekonomi⁹.

Jack C. Plano dan Roy Olton mengungkapkan apa yang dimaksud kepentingan nasional adalah politik luar negeri sebagai strategi atau bagian yang terencana dari tindakan yang dihasilkan oleh pembuat keputusan suatu negara di dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional yang tujuannya mencapai kepentingan nasional¹⁰. Kepentingan nasional secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu kepentingan dalam negeri dan kepentingan luar negeri. Untuk mewujudkan kepentingan tersebut sarana yang dilakukan adalah dengan melalui kebijakan politik setiap negara. Kebijakan dalam negeri suatu negara terkait dengan hubungan pemerintah dengan rakyatnya, sedangkan kebijakan luar negeri terkait dengan kepentingan internasional. Kesediaan Cina menjadi *host* KTT

⁸ Dorothy Pickles, *Pengantar Ilmu Politik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hal. 18

⁹ Jack C. Plano dan Roy Olton, *The International Relations Dictionary* (California: Western Michigan University, 1980), hal. 9

¹⁰ *Ibid*, hal. 127

ASEM VII adalah salah satu bentuk kebijakan luar negeri yang didasarkan pada kepentingan nasional Cina.

Menurut Jack C. Plano kepentingan nasional suatu negara tersebut dijadikan dasar dan penentu utama, menjadi pemandu para pembuat kebijakan dalam menentukan politik luar negeri atau tujuan utama yang dituju oleh negara. Kepentingan nasional yang menjadi dasar dapat mencakup :¹¹

- a. **Kelangsungan hidup bangsa dan negara (*self preservation*)**, adalah kepentingan nasional yang tujuannya untuk mempertahankan diri agar negara yang memiliki power besar tidak melakukan atau merebut hegemoni kekuasaan yang nantinya dapat menimbulkan perpecahan. Untuk mempertahankan diri tersebut, negara yang bersangkutan melakukan kerjasama bilateral ataupun multilateral dalam wadah organisasi internasional. Konsep pertahanan diri (*self preservation*) ini mengalami perkembangan, sebab pertahanan diri bukan hanya didasarkan pada landasan pertahanan terhadap geografdis negara tetapi berkaitan dengan kekuasaan hegemoni suatu negara kepada negara lain, sehingga menggunakan kekuatan-kekuatan dalam negeri untuk mempertahankan hegemoni kekuasaannya tersebut.
- b. **Kemerdekaan (*independence*)**, adalah kepentingan nasional yang tujuannya untuk mendapatkan kekuatan dengan melakukan kerjasama dengan negara lain dengan tujuan agar negara tersebut tidak dijajah atau tunduk kepada negara lainnya. Ketergantungan yang begitu besar yang dimiliki suatu negara terhadap negara lain dapat membuat negara itu sama dengan mengalami

¹¹ *Ibid*, hal. 217

penjajahan. Artinya, negara yang ketergantungannya tinggi pasti akan terikat untuk menuruti kehendak dari negara tempatnya bergantung.

Setiap negara berusaha memiliki kemandirian. Adanya kemandirian, membuat negara tersebut dapat menentukan berlangsungnya pemerintahan di negaranya tanpa intervensi negara lain. Suatu negara yang tidak memiliki kemandirian akan sulit untuk dapat menetapkan kebijakan di negaranya tanpa intervensi negara lain tempatnya bergantung.

- c. **Keutuhan wilayah (*territorial integrity*)**, adalah kepentingan nasional yang tujuannya mendapatkan kebutuhan terhadap suatu wilayah yang dinilai strategis dan menguntungkan. Misalnya penguasaan terhadap wilayah tertentu karena adanya sumber daya alam di wilayah tersebut. Suatu wilayah dapat diperebutkan oleh berbagai negara karena wilayah tersebut dinilai memiliki nilai tinggi. Contohnya, selain wilayah yang memiliki kandungan sumber daya alam, adalah wilayah yang letaknya strategis untuk perdagangan. Letak yang strategis memungkinkan negara yang memiliki wilayah tersebut tentu akan diuntungkan.
- d. **Keamanan militer (*military security*)**, adalah kepentingan nasional yang bertujuan untuk menjaga negara dari kekuatan militer negara lain atau sebagai antisipasi dari gangguan militer negara lainnya. Setiap negara berusaha untuk menghindari penjajahan dari negara lain, terutama dari tekanan militer yang dilakukan oleh negara yang kekuatan militernya lebih tinggi; dan
- e. **Kemakmuran ekonomi (*economic wellbeing*)**, adalah kepentingan nasional yang bertujuan untuk memperoleh cadangan devisa negara lain, misalnya

minyak dan gas. Kepentingan nasional tersebut memiliki tujuan untuk kesejahteraan ekonomi dalam negeri.

Berkaitan dengan tujuan kepentingan nasional, Charles O. Lerche dan Abdul A. Said berpendapat bahwa setiap negara selalu berusaha memperoleh hal-hal seperti:

*".....self preservation (of the collective entity of state and its human and teritorial manifestation), security, well-being prestige, power, the promotion and protection of ideology or any other as defined... by the decision makers of the country."*¹²

Cina dalam setiap keputusan melakukan aktivitas politik luar negeri pada kenyataannya berlandaskan pada kepentingan nasional. Dan jika dikaitkan dengan kepentingan Cina menjadi tuan rumah KTT ASEM VII, dari berbagai konsep mengenai kepentingan nasional di atas, pada dasarnya kepentingan Cina tidak lepas dari pencitraan suatu negara dan kesejahteraan ekonomi.

Tujuan Cina menjadi tuan rumah KTT ASEM VII adalah prestise yang baik. Dengan dilaksanakannya KTT ASEM tersebut, Cina berusaha menunjukkan citra yang positif sebagai tuan rumah dari perhelatan yang dihadiri oleh 45 negara anggota ASEM untuk menghilangkan citra negatif karena sorotan masyarakat internasional yang terkait dengan pelanggaran HAM di dalam negerinya. Cina sebagai tuan rumah berusaha menampilkan citra keramahan Cina dan menunjukkan bahwa Cina adalah negara yang pantas mendapat sorotan dalam hal positif di mata masyarakat dunia.

¹² Charles O. Lerche J.R dan Abdul A. Said, *Concept of International Politics* (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1963), hal. 9

Kemudian, kepentingan Cina berkaitan dengan kepentingan ekonomi (*economic wellbeing*), dapat dibagi menjadi dua kepentingan, yaitu : kepentingan meningkatkan kerjasama ekonomi dengan negara ASEM, dan memperluas kesempatan negara anggota ASEM untuk melakukan investasi di Cina.

Disimpulkan bahwa terdapat dua kepentingan nasional yang menyebabkan Cina bersedia menjadi tuan rumah KTT ASEM VII, yaitu kepentingan prestise (*well-being prestige*) dan kepentingan ekonomi (*economic wellbeing*). Kepentingan ekonomi Cina meliputi kepentingan meningkatkan kerjasama ekonomi dengan negara anggota ASEM, serta memperluas kesempatan negara anggota ASEM untuk melakukan investasi di Cina.

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran dan permasalahan di atas, maka penulis mencoba membuat dan merumuskan hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai dugaan awal atau jawaban sementara terhadap permasalahan. Penulis merumuskan hipotesis bahwa alasan Cina bersedia menjadi tuan rumah KTT ASEM VII Tahun 2008 adalah :

- mencapai prestise yang baik (*well-being prestige*), dan
- kepentingan ekonomi (*economic wellbeing*)

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu hal penting yang sangat mendukung suatu penelitian. Hadi mengemukakan bahwa metodologi merupakan

salah satu unsur penting dalam suatu penelitian ilmiah karena ketepatan metodologi dipergunakan sebagai dasar pemecahan masalah, sehingga akan diperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan¹³.

Metode penelitian ini adalah metode *non statistic* yaitu metode kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian dilaporkan apa adanya, selanjutnya dikumpulkan, dipilahkan, dikategorisasi, diinterpretasi, dipaparkan secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran fakta yang ada dan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik *library research* atau penelitian kepustakaan serta memperhatikan rekaan-rekaan informasi tertulis yang bersumber dari buku, majalah, surat kabar, situs internet serta catatan-catatan lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan fasilitas perpustakaan yang ada.

Data yang diperoleh dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu data yang bersifat teoritis digunakan sebagai landasan perspektif untuk mendeteksi masalah. Teori yang ada peneliti gunakan untuk memahami masalah dalam penelitian ini. Selanjutnya data yang bersifat deskriptif untuk mendukung dan memperkuat serta menjelaskan permasalahan yang ada mengenai kasus yang diteliti, yaitu kepentingan yang mendasari Cina bersedia menjadi tuan rumah KTT ASEM VII.

¹³ Hadi S., *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 2000), hal. 45

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui kepentingan yang mendasari Cina bersedia menjadi tuan rumah KTT ASEM VII.
2. Untuk membuktikan hipotesis yang ada dalam penelitian.
3. Menerapkan teori yang diperoleh selama kuliah dalam memahami, mengamati, mencermati, sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi.

G. Jangkauan Penelitian

Fokus penelitian ini dilakukan mulai dari tahun 2007-2008. Diawali pada tahun 2007 untuk mengetahui kondisi ekonomi Cina hingga mendapatkan kepercayaan untuk menjadi tuan rumah KTT ASEM VII. Tahun 2008 dipilih karena merupakan tahun pelaksanaan KTT tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian, maka penulis membuat sistematika penulisan.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan uraian mengenai dinamika perekonomian Cina yang didalamnya menjelaskan tentang perekonomian Cina di bawah sistem komunisme, Cina pada masa kepemimpinan Deng Xiaoping, serta upaya Cina berintegrasi dalam ekonomi internasional.

Bab ketiga menguraikan mengenai keberadaan KTT Asia-Europe Meeting (ASEM) yang terdiri dari pembahasan tentang sejarah terbentuknya *Asia-Europe Meeting* (ASEM), dan perkembangan ASEM Melalui Konferensi Tingkat Tinggi.

Bab keempat membahas tentang manfaat penyelenggaraan KTT ASEM VII bagi kepentingan Cina. Sub bab yang ada akan menguraikan tentang upaya meningkatkan prestise serta adanya kepentingan ekonomi Cina dalam bentuk meningkatkan kerjasama ekonomi Cina dengan negara ASEM, dan juga memperluas kesempatan negara anggota ASEM untuk melakukan investasi di Cina.

Bab kelima akan diuraikan tentang kesimpulan yang didapat setelah penelitian selesai dilaksanakan.